

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(DEPARTEMEN KESEHATAN, DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, ASKES, JAMSOSTEK DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2008-2009
Masa Persidangan : III
Rapat ke : --
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan : Ketua Umum Perhimpunan Jiwa Sehat
Sifat Rapat : **Terbuka**
Hari, tanggal : Rabu, 4 Februari 2009
Pukul : 14.00 WIB - selesai
Acara : Audiensi
Ketua Rapat : dr. Ribka Tjiptaning/Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Anggota : 23 orang anggota dari 50 Anggota Komisi IX DPR RI
3 orang ijin

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ketua Umum Perhimpunan Jiwa Sehat dibuka pukul 14.00 WIB setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 99 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia antara lain memaparkan mengenai pentingnya penanganan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat penderita gangguan jiwa, antara sbb. :

1. Jumlah penderita gangguan jiwa di Indonesia cukup besar dan jumlahnya semakin terus meningkat sehingga memerlukan penanganan dengan baik dan dikelola secara serius oleh pemerintah. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal pemerintah diminta menyediakan fasilitas pengobatan serta mengalokasikan anggaran yang memadai.
2. Kondisi yang terjadi saat ini bahwa para penderita gangguan jiwa sebagian besar mendapatkan perawatan dan penanganan dengan fasilitas yang tidak memadai, biasanya penderita gangguan jiwa dirawat oleh keluarganya sendiri secara tradisional. Selain biaya perawatan yang tinggi, fasilitas kesehatan yang disediakan tidak memadai tidak jarang pasien gangguan jiwa juga mengalami tindak kekerasan oleh perawatnya.

3. Selama ini sebagian besar masyarakat tidak memperoleh informasi secara jelas dan terbuka mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan penderita penyakit gangguan jiwa, bahkan tenaga medis yang tersedia jumlahnya sangat sedikit. Disamping itu, biaya perawatan bagi penderita gangguan jiwa juga relatif sangat tinggi sehingga masyarakat merawat pasien secara tradisional bahkan perawatan dilakukan apa adanya dan terkesan tidak manusiawi.
4. Melalui Komisi IX DPR-RI, Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia mengharapkan pemerintah dapat membantu menyediakan sarana informasi, fasilitas perawatan yang memadai, serta obat-obatan yang dapat dimasukkan dalam daftar obat yang dapat diklaim melalui jasa asuransi. Selama ini obat-obatan bagi penderita gangguan jiwa masih dibeli sendiri oleh keluarga pasien dan tidak disediakan oleh jasa asuransi.
5. Pemerintah diminta mengoptimalkan pelayanan di Puskesmas dan tersedianya obat-obatan khusus yang diperuntukkan bagi masyarakat yang menderita penyakit gangguan jiwa. Dengan mengoptimalkan peran dan fungsi pelayanan kesehatan di Puskesmas akan sangat membantu masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan secara murah dan mudah dijangkau masyarakat, khususnya untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat penderita gangguan jiwa.

III. TANGGAPAN KOMISI IX DPR RI

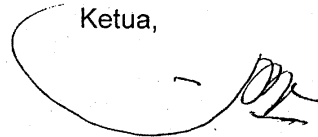
Menanggapi usul, saran dan masukan yang disampaikan Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia, Komisi IX DPR-RI menyampaikan tanggapan sbb. :

1. Komisi IX DPR-RI sangat menghargai dan berterima kasih atas berbagai masukan berharga yang disampaikan Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia, karena pada dasarnya seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan secara baik, termasuk bagi masyarakat penderita penyakit gangguan jiwa.
2. Komisi IX DPR-RI sependapat dengan Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia mengenai pentingnya pemerintah meningkatkan anggaran kesehatan yang ideal yaitu minimal 5% dibawah anggaran pendidikan sehingga para penderita gangguan jiwa juga memperoleh pelayanan kesehatan secara maksimal. Komisi IX DPR-RI akan meneruskan usul, saran dan masukan yang disampaikan Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia kepada Pemerintah dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan RI tanggal 11 Februari 2009.
3. Komisi IX DPR-RI menyarankan perlunya Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia mengadakan audiensi dengan Kepala Daerah karena banyak rumah sakit milik pusat yang ada di daerah yang memberikan pelayanan terhadap pasien penderita penyakit gangguan jiwa.

Rapat ditutup pukul 16.15 WIB

Jakarta, 4 Februari 2009

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI
Ketua,



Dr. RIBKA TJIPTANING